

Mangrove Jadi Opsi Solusi

Keberadaan hutan mangrove terbukti mampu meredam terangan tsunami pada 28 September 2018 di sebagian wilayah Teluk Palu, Sulawesi Tengah.

PALU, KOMPAS — Rencana pemerintah membangun tanggul untuk menahan abrasi dan pasang air laut di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, menuai kritik. Pemerintah diminta mempertimbangkan opsi menanam mangrove sebagai solusi jangka panjang pascatsunami, 28 September 2018.

Pemerintah akan membangun tanggul sepanjang 7,5 kilometer di Kecamatan Palu Barat. Rencana itu menjadi bagian dari rekonstruksi Kota Palu, pascagempa bumi dan tsunami yang menyebabkan kehancuran wilayah pantai dan turunnya tanah (*down-lift*) di sebagian kawasan pesisir Teluk Palu. Pembangunan tanggul itu sekaligus untuk mengatasi air pasang sepanjang 150 meter di bibir pantai hingga jalan poros Palu-Kabupaten Donggala.

Pembangunan tanggul yang akan dimulai Maret 2019 itu akan digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyatakan, tanggul dirancang lebih fleksibel dengan konstruksi dari tumpukan batu dengan lapisan kedap air. Dengan konstruksi itu, saat terjadi penurunan muka pantai, material batuan bisa dimasukkan lagi.

Rencana pembangunan tanggul menuai kritik dari kalangan aktivis lingkungan. Ketua Mangrover, komunitas pencinta mangrove di Teluk Palu, Ismail, menyatakan, pilihan terbaik untuk menjaga ekosistem pesisir adalah mangrove. "Mangrove melindungi wilayah pesisir untuk jangka panjang, bukan seperti tanggul yang meski bisa dibangun dalam waktu yang singkat bisa juga rusak dalam waktu yang singkat," ujar Ismail, di Palu, Selasa (15/1/2019).



KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Hutan bakau sebagai bagian dari ekosistem mangrove di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mampu meredam terangan tsunami pada 28 September 2018. Rumah yang terletak di pesisir pantai di Kelurahan Kabonga Besar, Selasa (15/1/2019), tampak berdiri kokoh.

Ismail meminta pemerintah tidak terjebak mengejar rekonstruksi Kota Palu hanya dengan menghitung waktu pembangunan yang singkat. Kepentingan jangka panjang harus jadi pertimbangan utama.

Menanam mangrove diyakini lebih murah daripada membangun tanggul. Mangrove juga terbukti mampu meredam terangan tsunami, seperti di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Daerah itu dilindungi mangrove sehingga tsunami mampu diredam.

"Mangrove bukan hanya mencegah pasang atau abrasi, melainkan juga meminimalkan jatuhnya korban dan kerusakan akibat tsunami," ujarnya.

Pantauan di Kelurahan Kabonga Besar, tak terlihat keru-

sakan akibat terangan tsunami di daerah itu, terutama di RW 002. Rumah-rumah warga di lingkungan hutan mangrove seluas 10 hektar dan tak ada yang rusak. Padahal, ada rumah yang berjarak hanya 5 meter dari bibir pantai.

Kondisi itu kontras dengan wilayah pesisir lain, mulai dari Kota Palu hingga RW 001 Kelurahan Kabonga Besar. Kehancuran karena sapuan tsunami terjadi di titik-titik tersebut.

"Saat tsunami lalu, air laut memang sampai ke rumah-rumah dan jalan, tetapi tak ada eruginya. Kami di sini tak merasakan adanya tsunami, yang terasa hanya air laut pasang," kata Yurianti (39), warga RT 001 RW 002 yang juga Ketua Kelompok Tani Hutan Goneng-geti Jaya, Kabonga Besar.

Hunian tetap

Masih terkait penanganan pascabencana Sulteng, sambil merampungkan pembangunan hunian sementara dan menempatkan penyintas secara bertahap, pemerintah kini fokus membangun hunian tetap.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyatakan, desain induk hunian tetap tengah difinalisasi. Lahan yang dipakai untuk relokasi merupakan lahan hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) sejumlah perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir ditanamkan.

"Memang ada pemegang HGU atau HGB keberatan, tetapi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional punya kekuatan yang menegaskan bahwa dalam ke-

adaan darurat dan untuk kepentingan negara semua hak boleh diambil alih oleh negara," katanya.

Relokasi penyintas tersebar di empat titik, yakni dua titik di Palu, satu titik di Donggala, dan satu titik Sigi.

Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, jajaran Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti dalam tiga bulan mendatang akan membantu rehabilitasi-rekonstruksi rumah hunian tetap korban gempa. Sekitar 7000 anggota TNI, 500 polisi, dan 1000 fasilitator Pemprov NTB dilibatkan untuk membangun hunian tetap itu.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah berharap, bantuan aparat keamanan bisa mempercepat pembangunan hunian tetap.

(VDL/RUL)